

# LAPORAN KEGIATAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(MUSRENBANG) TAHUN 2023

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

HOTEL SHERATON, 13 MARET 2023



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Drs. Warsito No. 76, Teluk Betung

2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan, kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya kegiatan Musrenbang Kelautan dan Perikanan dapat terlaksana dengan baik.

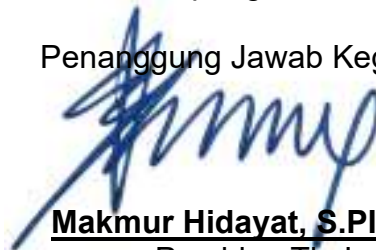
Musrenbang Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Lampung, dimaksudkan untuk memberikan masukan dan meningkatkan kolaborasi antar stake holder terkait di pusat dan daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan pembangunan sektor kelautan perikanan tahun 2024. Tema Musrenbang yaitu “Hilirisasi, Digitalisasi dan Green Economy sektor Kelautan dan Perikanan”.

Pertemuan Musrenbang dihadiri sebanyak 75 orang stake holder terkait sektor kelautan dan perikanan, meliputi : Kepala Perangkat Daerah terkait urusan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kepala UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Provinsi Lampung, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kalangan Dunia Usaha, Organisasi, Asosiasi, Shrimp Club, HNSI, MAI, FKPA, NGO dan penyuluh perikanan.

Semoga acara ini dapat memberikan manfaat, bagi pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung

Bandar Lampung,     Maret 2023

Penanggung Jawab Kegiatan,



**Makmur Hidayat, S.PI.,M.M**

Pembina Tk. I

NIP.19700925 199803 1 005

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024. Perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan perkembangan situasi perekonomian dunia dan situasi dalam negeri, peluang serta tantangan yang semakin dinamis. Memasuki tahun ke 4 masa pemerintahan, kita perlu mengevaluasi pencapaian kinerja utama, melakukan penajaman dan fokus pada pelaksanaan agenda kerja utama yang sudah ditetapkan. Khusus untuk sektor kelautan dan perikanan, Agenda Kerja Kartu Petani Berjaya atau e KPB dan Nelayan Berjaya harus benar-benar terintegrasi dan didukung dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pengembangan inovasi di sektor perikanan diperlukan sinergitas dan kolaborasi dengan pelaku usaha perikanan. Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkreasi di sektor perikanan dengan tidak terpaku pada hasil tangkapan ikan saja, tetapi berupaya mengolahnya menjadi bahan baku untuk sebuah produk jadi atau setengah jadi.

Dalam meningkatkan kolaborasi antar *stake holder* terkait di pusat dan daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan pembangunan sektor kelautan perikanan tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sektor Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Lampung tahun 2023 mengambil Tema yaitu “*Hilirisasi, Digitalisasi dan Green Economy sektor Kelautan dan Perikanan*”

Hilirisasi Digitalisasi dan *Green Economy* sektor Kelautan dan Perikanan pada produk perikanan di berbagai UMKM ini tentu saja untuk penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan membuka lapangan kerja baru. Ekonomi pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerjanya didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengurangi emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi

energi dan sumber daya, serta mencegah lenyapnya keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. Pengembangan hilirisasi produk perikanan akan menjadi nilai tambah dan memperkuat industri perikanan dari hulu hingga hilir. Namun demikian, program tersebut harus diiringi dengan penguatan di hulu sehingga tidak terkendala dengan persediaan bahan baku dan sumber daya manusia yang ada. Untuk meningkatkan daya saing usaha mikro kecil kelautan dan perikanan dalam memasarkan produknya di pasar digital dalam rangka memperluas akses pasar dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan UMKM dapat mengatasi sebagian dari permasalahan tersebut. Beberapa di antaranya melalui pemasaran yang semakin terbuka dan tanpa batas, serta permodalan yang semakin cepat dan mudah. Melalui kegiatan Musrenbang ini diharapkan memberikan input kebijakan, saran dan arahan dari narasumber maupun stake holder terkait, sebagai masukan berharga dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu untuk menjalin kolaborasi dan sinergi antar pihak untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

## 1.2. Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2023 yaitu:

- ✚ Identifikasi dan menghimpun isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- ✚ Penyampaian strategi, arahan dan masukan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan dari pusat dan daerah, praktisi dan akademisi.

Keluaran dari kegiatan (Musrenbang) tahun 2023 berupa :

- ✚ Isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang memerlukan koordinasi lintas sektor;
- ✚ Saran dan rekomendasi, bagi penyusunan program dan kegiatan serta inovasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

## II. PELAKSANAAN

### Dasar Pelaksanaan

- ✚ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- ✚ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- ✚ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
- ✚ Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor: : 912/079/V.19-SET.3/2023 Tentang Pembentukan Panitia dan Penetapan Narasumber Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

### 2.2. Waktu dan Tempat

- ✚ Hari : Senin
- ✚ Tanggal : 13 Maret 2023
- ✚ Tempat : Hotel Sheraton Bandar Lampung,  
Jl. Wolter Monginsidi No. 175 Kota Bandar Lampung.

### 2.3. Panitia Pelaksana

Penanggung jawab: Makmur Hidayat, S.Pi., M.M  
Ketua : Arif Kurniawan H, S.Pi.,M.IL  
Sekretaris : Desi Rahmawati, S.Pi.,M.M

Anggota :

1. Nurul Luthfia Kartika, S.Pi
2. Budi Suhardo, A.Md
3. Bachtiar Sanjaya, S.A.N
4. Santi Hasanah, S.T

MC : Oca Patrycia, S.Pd.,M.Pd

Doa : Sayuti

Moderator

:

1. Makmur Hidayat, S.Pi.,M.M
2. Ir. Marliana

### III. MATERI DAN NARASUMBER

Materi dan narasumber dalam pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023:

No.	Materi	Narasumber
1.	Arahan Gubernur Lampung	<b>Ir. Zainal Abidin, M.T</b> (Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan)
2.	Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	<b>Agus Haryanto, S.Pi, M.Si,</b> Subkoord Penyerasian Renja, Biro Perencanaan KKP
3.	Arah Kebijakan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024	<b>Haryo Wicaksono, SE.</b> Bappeda Provinsi Lampung
4.	Arah Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	<b>Ir. Liza Dorni, MM</b> Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
5.	Potret Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2020-2022	<b>Ir. Dwiyana Suharyati, M.M.</b> (Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik, BPS Provinsi Lampung)
6.	Pelaksanaan Tri Dharma dan Penelitian Lingkup Perikanan di Politeknik Negeri Lampung	<b>Dr. Rakhmawati, S.Pi., M.Si.</b> (Polinela)
7.	Peluang dan Tantangan UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Menuju Pasar Ekspor	<b>Muhammad Ravie</b> (UMKM Rafins)
8.	Peluang dan Tantangan Budidaya Udang yang Berkelanjutan di Provinsi Lampung	<b>Waiso</b> (Ketua FKPA)
9.	Potensi Pengembangan Digitalisasi Perikanan di Provinsi Lampung	<b>Fauzan Fajrin</b> ( <i>E Fishery</i> )

#### IV. PESERTA

Peserta pertemuan berjumlah 75 (Tujuh Puluh) orang terdiri dari :

- ✚ Kepala Perangkat Daerah terkait urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung;
- ✚ Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- ✚ Kepala UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Provinsi Lampung;
- ✚ Pimpinan Perguruan Tinggi;
- ✚ Kalangan Dunia Usaha, Organisasi, Asosiasi, Shrimp Club, HNSI, MAI, FKPA, NGO dan penyuluh perikanan;
- ✚ Para Stakeholder dan undangan lainnya.

#### V. JADWAL ACARA

Jadwal acara Pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 :

Waktu	Acara	Narasumber	Moderator
1	2	3	4
<b>SENIN 13 Maret 2023</b>	<b>Musrenbang Kelautan dan Perikanan</b>		
08.30-09.00	Registrasi		
09.00-09.45	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya</li><li>- Laporan Ketua Panitia</li><li>- Sambutan Sekretaris Daerah</li><li>- Doa</li></ul>	Kepala Dinas Sekda Prov Lampung	MC
09.45-10.00	<i>Coffe Break</i>		
10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</li><li>- Arah Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</li><li>- Potret Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2020-2022</li><li>- Pelaksanaan Tri Dharma dan Penelitian Lingkup Perikanan di Politeknik Negeri Lampung</li></ul>	Biro Perencanaan KKP  Bappeda Prov Lampung  Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Polinela	Sekretaris Dinas
12.00-13.00	Ishoma		
13.00-14.30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peluang dan Tantangan UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Menuju Pasar Ekspor</li></ul>	UMKM Rafins	Kabid PBPDS

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peluang dan Tantangan Budidaya Udang yang Berkelanjutan di Provinsi Lampung</li> <li>- Potensi Pengembangan Digitalisasi Perikanan di Provinsi Lampung</li> </ul>	<p style="text-align: center;">FKPA</p> <p style="text-align: center;">Starup Perikanan</p>	
--	--	---	--

## VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan TAHUN 2023 dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung : DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung TA. 2023 Nomor : Nomor : 3.25.0.00.0.00.01.01.06.01.03.5 Tgl 02 Januari 2023

## VII. HASIL KEGIATAN

Setelah memperhatikan dan mendengarkan hasil Arahan, Paparan dan Diskusi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan tema “**Hilirisasi, Digitalisasi dan Green Economy sektor Kelautan dan Perikanan**”, dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan mendukung dan akan bersinergi dalam melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan transformasi perikanan dengan prioritas pada Hilirisasi, Digitalisasi dan Perikanan berkelanjutan sesuai dengan bidang, tugas dan kewenangan yang ada baik di pusat, daerah, perguruan tinggi dan pelaku usaha.
2. Tema RKPD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 yaitu **Pemantapan Transformasi Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya** dengan arah kebijakan terkait perikanan yaitu Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) serta Meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan dengan penguatan rantai pemasaran, kemudahan berusaha, dan insentif investasi.



3. Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 – 2024 berbasis **Ekonomi Biru** yang meliputi : 1). Perluasan Kawasan Konservasi Perairan; 2). Penangkapan Ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; 3). Pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal; 4). Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; 5). Penanganan dan pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan Bulan Cinta Laut.
4. Akademisi / Perguruan tinggi diharapkan memberikan kontribusi dalam menjawab isu permasalahan dan masukan terhadap kebijakan sektor kelautan dan perikanan antara lain melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
5. Beberapa usulan, masukan dan permasalahan terkait sektor kelautan dan perikanan yang disampaikan oleh stakeholder / pelaku usaha utama antara lain : perlunya dukungan terhadap hilirisasi, diversifikasi dan digitalisasi produk olahan hasil perikanan; kebutuhan perbaikan dan penyediaan prasarana seperti jalan produksi, pengerukan saluran (PITAP), irigasi dan cool storage, termasuk penyediaan SDM perikanan khususnya tenaga penyuluh perikanan dan teknisi tambak; Pembinaan dan pelatihan teknologi budidaya terkini, pengambilan sampel air hingga mekanisme perizinan.
6. Dinas Perikanan kabupaten/kota agar menyampaikan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah dilengkapi dengan data dukung dan memperhatikan pembagian kewenangan, arah kebijakan di pusat dan provinsi. Usulan kegiatan dan lokasi agar disesuaikan dengan mekanisme pengusulan dalam Musrenbang Provinsi Lampung dan dilengkapi data dukung yang sesuai.

## VIII PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 ini

dibuat dengan harapan menjadi acuan dan masukan dalam pembangunan masyarakat khususnya sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung,     Maret 2023

Ketua Panitia,



**Makmur Hidayat, S.Pi, M.M.**

Pembina TK. I

NIP. 19700925 199803 1 005

# LAMPIRAN

1. Sambutan dan Arahan Sekda Provinsi Lampung
2. Materi Narasumber
3. Dokumentasi Kegiatan

# LAPORAN KEGIATAN

## MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024



MEETING ROOM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG, 22 APRIL 2024

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Drs. Warsito No. 76, Teluk Betung

2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan, kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya kegiatan Musrenbang Kelautan dan Perikanan dapat terlaksana dengan baik.

Musrenbang Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Lampung, dimaksudkan untuk menyampaikan program, meningkatkan kolaborasi dan kegiatan pembangunan, membahas isu-isu strategis bidang Kelautan dan Perikanan, dan memperkuat sinergi seluruh stakeholder Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di tahun 2025.

Pertemuan Musrenbang dilaksanakan secara daring dan luring dihadiri berjumlah 69 orang (50 luring dan 19 Daring) stake holder terkait sektor kelautan dan perikanan, meliputi : Kepala Perangkat Daerah terkait urusan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Lampung, Kepala UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Provinsi Lampung, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB) Provinsi Lampung, Kalangan Dunia Usaha, Organisasi, Asosiasi, Shrimp Club, HNSI, MAI, FKPA, LSM Mitra Bentala dan IPKANI.

Semoga acara ini dapat memberikan manfaat, bagi pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, April 2024

Penanggung Jawab Kegiatan,



**Desi Rahmawati, S.PI.,M.M**

Penata Tk. I

NIP.19841211 200902 2 003

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024. Perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan perkembangan situasi perekonomian dunia dan situasi dalam negeri, peluang serta tantangan yang semakin dinamis. Memasuki tahun ke 4 masa pemerintahan, kita perlu mengevaluasi pencapaian kinerja utama, melakukan penajaman dan fokus pada pelaksanaan agenda kerja utama yang sudah ditetapkan. Khusus untuk sektor kelautan dan perikanan, Agenda Kerja Kartu Petani Berjaya atau e KPB dan Nelayan Berjaya harus benar-benar terintegrasi dan didukung dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pengembangan inovasi di sektor perikanan diperlukan sinergitas dan prioritas rencana kerja pemerintah, sasaran pembangunan ditahun 2025 Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019, terdapat indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan, yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Angka Konsumsi Ikan, Luas Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dikelola serta Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif. Dengan demikian diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersinergi dengan dinas kabupaten/kota, UPT Pusat serta stakeholder terkait dalam pencapaian indikator tersebut, disamping juga tetap memperhatikan kebutuhan dan isu permasalahan yang sedang terjadi didaerah.

Dalam meningkatkan kolaborasi antar *stake holder* terkait di pusat dan daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan pembangunan sektor kelautan perikanan tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sektor Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Lampung tahun 2025.

Program prioritas dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan di tahun 2025 melindungi laut dan sumberdaya dengan memperluas Kawasan konservasi, mengurangi tekanan dan aaktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dengan menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, menjaha kelestarian wilayah laut dengan melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan melakukan pembersihan sampah plastik dilaut melalui partisipasi nelayan.

Dengan ditetapkan rancangan arah kebijakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 diharapkan Provinsi, kabupaten dan Kota meselaraskan kebijakan, saran dan arahan dari narasumber maupun stake holder terkait, sebagai masukan berharga dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu untuk menjalin kolaborasi dan sinergi antar pihak untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

## 1.2. Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yaitu:

- ✚ Identifikasi dan menghimpun isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- ✚ Penyampaian strategi, arahan dan masukan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan dari pusat dan daerah, praktisi dan akademisi.

Keluaran dari kegiatan (Musrenbang) tahun 2024 berupa :

- ✚ Isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang memerlukan koordinasi lintas sektor;
- ✚ Saran dan rekomendasi, bagi penyusunan program dan kegiatan serta inovasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

## II. PELAKSANAAN

### Dasar Pelaksanaan

- ✚ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- ✚ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- ✚ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- ✚ Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor: : 912/130/V.19-SET.3/2024 Tentang Pembentukan Panitia dan Penetapan Narasumber Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

### 2.2. Waktu dan Tempat

- ✚ Hari : Senin
- ✚ Tanggal : 22 April 2024
- ✚ Tempat : Meeting room Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Jln Drs. Warsito No 76, Telukbetung, Bandar Lampung.

### 2.3. Panitia Pelaksana

- Penanggung jawab : Desi Rahmawati, S.Pi.,M.M
- Ketua : Budi Suhardo, A.Md
- Sekretaris : Bachtiar Sanjaya, S.A.N



- Anggota :
1. Resta Kurnia Dewi, A.Md
  2. Budi Suhardo, A.Md
  3. Gery Gahara, S.Kom
- MC : Resta Kurnia Dewi, A.Md
- Doa : Sayuti
- Moderator :
1. Ir. Marliana
  2. Arif Kurniawan H. S.Pi., MIL

### III. MATERI DAN NARASUMBER

Materi dan narasumber dalam pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024:

No.	Materi	Narasumber
1.	Program Prioritas dan Kegiatan KKP dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Biru Tahun 2025	<b>Dr. Andy Artha Donny Oktopura, S.T., M.T., M.Eng</b> (Kepala Biro Perencanaan KKP)
2.	Arah Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	<b>Kaizan, SP., M.Si</b> Bappeda Provinsi Lampung
3.	Potret Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2021-2023	<b>Ir. Dwiyana Suharyati, M.M.</b> (Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik, BPS Provinsi Lampung)
4.	Arah Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	<b>Makmur Hidayat, S.Pi., MM</b> Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

### IV. PESERTA

Peserta pertemuan berjumlah 69(Enam Puluh Sembilan) orang terdiri dari :

- 🚩 Kepala Perangkat Daerah terkait urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung;

- ✚ Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- ✚ Kepala UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Provinsi Lampung;
- ✚ Pimpinan Perguruan Tinggi;
- ✚ Kalangan Dunia Usaha, Organisasi, Asosiasi, Shrimp Club, HNSI, MAI, FKPA, NGO dan penyuluh perikanan;
- ✚ Para Stakeholder dan undangan lainnya.

## V. JADWAL ACARA

Jadwal acara Pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 :

Waktu	Acara	Narasumber	Moderator
1	2	3	4
<b>SENIN 22 April 2024</b>	<b>Musrenbang Kelautan dan Perikanan</b>		
08.30-09.00	Registrasi		
09.00-09.45	Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Sambutan Kepala Dinas - Doa	Kepala Dinas	Kepala Dinas
09.45-10.00	<i>Coffe Break</i>		
10.00-12.00	Program Prioritas dan Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Biru Tahun 2025. (online/offline)	Biro Perencanaan KKP	Sekretaris Dinas
	Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025	Bappeda Prov Lampung	
	Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020-2023	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung	
12.00-13.00	Ishoma		
13.00-14.30	Penyampaian Isu Strategis, Rencana Prioritas dan Usulan Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2025 (masing-masing 10 Menit)	Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota	Kabid PBPDS
15.00 - Selesai	Penutupan		Panitia

## VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung : DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung TA. 2024 Nomor : Nomor : 3.25.0.000.0.0.23.0000/001/2024 Tgl 02 Januari 2024.

## VII. HASIL KEGIATAN

Setelah memperhatikan dan mendengarkan hasil Arahan, Paparan dan Diskusi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan mendukung dan akan bersinergi dalam melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan transformasi perikanan sesuai dengan bidang, tugas dan kewenangan yang ada baik di pusat, daerah, perguruan tinggi dan pelaku usaha.
2. Tema RKPD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 yaitu **Pemantapan Transformasi Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya** dengan arah kebijakan terkait perikanan yaitu Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) serta Meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan dengan penguatan rantai pemasaran, kemudahan berusaha, dan insentif investasi.
3. Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2025 berbasis **Ekonomi Biru** yang meliputi : 1). Perluasan Kawasan Konservasi Perairan; 2). Penangkapan Ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; 3). Pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal; 4). Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; 5). Penanganan dan pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan Bulan Cinta Laut.
4. Akademisi / Perguruan tinggi diharapkan memberikan kontribusi dalam menjawab isu permasalahan dan masukan terhadap kebijakan sektor

kelautan dan perikanan antara lain melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

- 5.
- 6.
7. Dinas Perikanan kabupaten/kota agar menyampaikan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah dilengkapi dengan data dukung dan memperhatikan pembagian kewenangan, arah kebijakan di pusat dan provinsi. Usulan kegiatan dan lokasi agar disesuaikan dengan mekanisme pengusulan dalam Musrenbang Provinsi Lampung dan dilengkapi data dukung yang sesuai.

## VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini dibuat dengan harapan menjadi acuan dan masukan dalam pembangunan masyarakat khususnya sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, April 2024

Ketua Panitia,



**Budi Suhardo. A.Md**

Pengatur TK I /IId

NIP. 19820202 201407 1003

# LAMPIRAN

1. Materi Narasumber
2. Dokumentasi Kegiatan









